



Dilema Penerimaan Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Etika Pembuatan Keputusan

Fauzan Aziima Ellandra¹, Zachary Zacky Sapan Putra², Joshua³

Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia¹²³

Abstract

Received: 07 Juli 2024

Revised: 17 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Makalah ini mengeksplorasi dilema yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam mengakomodasi pengungsi etnis Rohingya dari perspektif etika dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menitikberatkan pada penyelidikan tantangan moral dan aspek kebijakan dampak langsung dari krisis kemanusiaan di Myanmar. Dalam konteks kerangka etika pembuatan keputusan, makalah ini berusaha melakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan dan nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dalam menerima dan mengelola pengungsi tersebut. Dengan melakukan tinjauan kritis terhadap aspek-aspek etis yang terlibat dalam proses keputusan ini, makalah ini bertujuan memberikan wawasan yang mendalam mengenai dampak sosial, politik, dan kemanusiaan yang mungkin timbul dari kebijakan penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia.

Keywords: *Dilema, Pengungsi Rohingya, Etika, Keputusan, Kebijakan.*

(*) Corresponding Author: ellandrafauzan@gmail.com, zacharyzacky301104@gmail.com, joshuanaingolan2004@gmail.com

How to Cite: Ellandra, F., Putra, Z., & ., J. (2024). Dilema Penerimaan Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Etika Pembuatan Keputusan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 539-547. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13731787>

PENDAHULUAN

Pada 14 November 2023 lalu, rombongan pengungsi Rohingya tiba di Indonesia dan jumlahnya sudah mencapai 219 pengungsi. Etnis Rohingya adalah sekelompok minoritas Muslim di Myanmar yang tinggal di Rakhine, salah satu negara bagian yang kurang mampu di Myanmar. Di antara 50 juta orang yang tinggal di Myanmar, satu juta dari keseluruhan populasinya merupakan bagian dari etnis Rohingya. Sekitar 140.000 dari mereka tinggal di kamp konsentrasi di Rakhine dan tidak dapat bepergian tanpa izin dari pemerintah setempat.

Etnis Rohingya di Myanmar harus melakukan migrasi ke negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura karena konflik di Myanmar yang menargetkan etnis Rohingya. Konflik ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti: status yang berbeda, bukan kelompok etnis mayoritas Myanmar, dan diskriminasi budaya oleh masyarakat. Puncak dari konflik ini ditandai dengan adanya pembakaran besar-besaran terhadap perumahan yang dihuni oleh etnis Rohingya serta penyerangan yang dilakukan kepada etnis Rohingya di Myanmar

Keputusan etnis Rohingya untuk mencari perlindungan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang melibatkan aspek sosial, politik, dan kemanusiaan. Tradisi kemanusiaan Indonesia, yang diwarnai oleh toleransi yang kuat, memberikan fondasi untuk kebijakan penerimaan pengungsi, terutama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, menciptakan lingkungan

yang lebih ramah bagi mereka yang mencari perlindungan. Selain itu, kebijakan luar negeri Indonesia yang responsif terhadap isu kemanusiaan menarik perhatian etnis Rohingya, mencerminkan komitmen Indonesia pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perdamaian internasional. Peran geopolitik Indonesia, yang terwujud melalui dominasinya di ASEAN dan keanggotaan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, memberikan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi mediator efektif dalam menangani konflik dan krisis di tingkat regional dan global. Keseluruhan, faktor-faktor ini berinteraksi secara kompleks dalam membentuk pilihan etnis Rohingya untuk mengungsi di Indonesia.

POKOK PERMASALAHAN

1. Dilema Penerimaan Pengungsi Rohingya di Indonesia

Penelitian ini menekankan dilema yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengakomodasi pengungsi etnis Rohingya dari perspektif etika dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi tantangan moral dan aspek kebijakan terkait penerimaan pengungsi Rohingya sebagai dampak langsung dari krisis kemanusiaan di Myanmar.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika Pengambilan Keputusan terkait Penerimaan Pengungsi

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi etika dalam pengambilan keputusan terkait penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia. Ini mencakup analisis yang mendalam terhadap pertimbangan dan nilai-nilai yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam menerima dan mengelola pengungsi tersebut.

3. Aspek Etika dalam Proses Keputusan Penerimaan Pengungsi

Penelitian ini berupaya untuk melakukan analisis mendalam terhadap aspek-aspek etika yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan wawasan mendalam mengenai dampak sosial, politik, dan kemanusiaan yang dapat timbul dari kebijakan penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia.

TUJUAN PENELITIAN

Dalam menghadapi dilema penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi etika pengambilan keputusan terkait penerimaan mereka terhadap proses pengungsian di Indonesia, sehingga berikut adalah beberapa poin yang kami rangkum terkait tujuan penelitian kami :

1. Menganalisis etika keputusan penerimaan pengungsi Rohingya
2. Mengevaluasi dilema keputusan penerimaan pengungsi Rohingya
3. Menganalisis dampak sosial dan kemanusiaan
4. Mengidentifikasi alternatif keputusan yang lebih beretika

KERANGKA TEORI

1. Teori Pengambilan Keputusan (*Behavioural Decision Theory*)

Menurut Harold dan O'donnell (1997) dalam Ariati (2014), konsep pengambilan keputusan merujuk pada proses pemilihan di antara berbagai alternatif terkait dengan tindakan yang akan diambil. Kehadiran keputusan dianggap sebagai elemen

kunci dalam merancang rencana, berperan sebagai pedoman yang dapat diandalkan serta membentuk reputasi.

Dalam kerangka teori pengambilan keputusan, penelitian difokuskan pada peninjauan alternatif yang sesuai untuk dijadikan keputusan, yang tentu saja terkait dengan perilaku individu dalam mengambil keputusan. Teori ini mengakui bahwa setiap individu memiliki keterbatasan pengetahuan dan bertindak berdasarkan persepsinya terhadap situasi yang dihadapi. Dalam konteks ini, variabilitas pengetahuan antarindividu menjadi elemen yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Penting untuk dicatat bahwa pengaruh dari lingkungan sosial, mencakup tekanan dan pengaruh politik, sosial, dan ekonomi, juga turut memainkan peran dalam membentuk kerangka keputusan seseorang.

2. Etika

Pada dasarnya, etika bersumber dari bahasa Yunani, yakni Ethos, yang menggambarkan sifat dan kebiasaan. Dalam lingkup ini, etika mencakup nilai-nilai, norma-norma kehidupan yang baik, peraturan hidup yang benar, dan segala kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Intinya terletak pada penerapan akal dengan pendekatan obyektif untuk menentukan benar atau salah, serta dalam tindakan seseorang terhadap sesamanya. Sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh Rushworth M. Kidder dalam karyanya "How Good People Make Tough Choices" (2009), etika diartikan sebagai studi mengenai karakter manusia atau pemahaman mengenai kewajiban moral yang mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang.

3. Keputusan Etis

Suatu keputusan dinilai etis jika sudah mempertimbangkan fakta yang ada, menempatkan diri pada posisi orang lain yang terkena dampak, dan meninjau serta mengevaluasi beberapa alternatif yang ada. Hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan sehingga manfaat yang dirasakan dapat berdampak baik bagi pihak-pihak yang terkait.

4. Deontologi

Deontologi memandang baik atau buruk secara moral bergantung pada kepatuhan terhadap aturan moral atau kewajiban universal. Tindakan yang benar dilakukan berdasarkan pada kewajiban moral yang mutlak, bukan semata-mata berdasarkan konsekuensi yang mungkin timbul. Deontologi merupakan kerangka yang kokoh untuk membahas dan menilai moralitas tindakan, dengan menekankan pada prinsip-prinsip yang stabil dan kewajiban yang universal.

5. Utilitarianisme

Utilitarianisme menekankan bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang konsekuensi atau hasilnya merupakan hasil terbaik dan berdampak bagi kebahagiaan banyak orang. Prinsip utamanya adalah "tindakan yang menghasilkan akibat yang paling menguntungkan bagi sebanyak mungkin orang adalah tindakan yang etis atau baik."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berfokus pada langkah-langkah metodologis untuk mendalami konsep dilema penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia dari sudut pandang etika pembuatan keputusan. Metode ini mengarah kepada upaya menggambarkan dan menjelaskan makna yang melibatkan suatu kerangka etis dalam mengambil keputusan terkait penerimaan pengungsi tersebut.

Analisis tema dan triangulasi dari berbagai sumber data akan digunakan untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan. Keseluruhan metode penelitian kualitatif ini dirancang untuk menyelidiki secara holistik dan mendalam dilema etika dalam penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia, dengan memperhatikan berbagai perspektif dan konteks kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kedatangan Rohingya

Pengungsi Rohingya melakukan migrasi ke Indonesia disebabkan oleh pengalaman diskriminatif dan konflik antar etnis yang mengancam keamanan dan kelangsungan hidup etnis Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya sendiri sudah menjadi bahan penindasan di Myanmar sejak lama. Etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya sejak dikeluarkan kebijakan UU Kewarganegaraan tahun 1982 oleh pemerintah Myanmar dan kerap menjadi pusat perilaku diskriminatif di Myanmar. Diskriminasi dan kecaman terhadap etnis Rohingya makin memanas dengan adanya konflik etnis antar etnis Rohingya dan etnis Rakhine yang akhirnya memuncak pada bulan Juli-Agustus 2012. Banyak kelompok dari etnis Rohingya akhirnya memutuskan untuk berlabuh meninggalkan negara mereka dan mencoba mengungsi ke negara lain. Tidak sedikit juga dari mereka yang terombang-ambing di wilayah Selat Malaka dan akhirnya masuk ke daratan Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia.

Etnis Rohingya secara rombongan pertama kali melakukan pengungsian ke Indonesia tepatnya di wilayah Aceh dari tahun Januari 2009 sebanyak lebih dari 150 pengungsi. Angka tersebut semakin meningkat setiap tahunnya hingga ke angka lebih dari 850 pengungsi di tahun 2016. Reaksi warga Aceh pada awalnya antusias menyambut dan menampung etnis Rohingya yang mencoba mengungsi di Indonesia. Ada beberapa alasan yang bisa menjadi pertimbangan penerimaan etnis Rohingya oleh warga Aceh seperti kesamaan identitas agama dan latar belakang. Namun seiring berjalannya waktu, warga Aceh menjadi lebih tidak mau menampung pengungsi Rohingya di wilayahnya. Alasannya dianggap pengungsi Rohingya kurang tertib dalam menaati aturan setempat dan kelebihan kapasitas pengungsi Rohingya di wilayah tersebut. Hingga sekarang di bulan November 2023, warga Aceh melakukan unjuk rasa di tempat penampungan Rohingya di Aceh. Situasi seperti sekarang di Aceh harus bisa dikontrol dan ditanggulangi oleh pemerintah Indonesia.

Aspek Kebijakan terkait dengan Penerimaan Pengungsi Rohingya

Krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya menjadi sorotan utama dalam tataran internasional, dan pemerintah Indonesia turut aktif dalam menanggapi situasi yang menantang ini. Penelitian ini bertujuan untuk secara mendalam menginvestigasi aspek kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah

Indonesia terkait penerimaan pengungsi Rohingya. Dengan melakukan analisis yang teliti terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan pemerintah.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk membuka pintu bagi pengungsi Rohingya tidak hanya mencerminkan respons terhadap krisis kemanusiaan, melainkan juga mencatatkan komitmen untuk turut serta secara aktif dalam penyelesaian akar permasalahan. Pendekatan analisis ini diarahkan untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana kebijakan penerimaan pengungsi Rohingya mencerminkan landasan filosofi kebijakan luar negeri Indonesia yang humanis dan responsif terhadap dinamika perubahan global.

Pada dasarnya, Indonesia tidak memperkuat statusnya sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Namun, Indonesia telah mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menetapkan hak dasar bagi semua orang, termasuk hak untuk hidup, berpindah, merasa aman, dan sehat.

Indonesia masih menjadi satu-satunya negara yang tetap terbuka untuk menerima pengungsi Rohingya di wilayahnya, terutama selama pandemi COVID-19. Ini berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia yang telah menolak kedatangan pengungsi Rohingya bahkan sebelum pandemi.

Dalam menangani isu pengungsi etnis Rohingya di Indonesia, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Presiden 125/2016. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap posisi Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi.

Peraturan Presiden 125/2016 menguraikan mengenai pengakuan Indonesia terhadap status pengungsi dan memberikan penjelasan teknis mengenai prosedur penanganan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang tiba di Indonesia. Keberadaan peraturan presiden ini menjadikan penanganan terhadap pengungsi sebagai isu lintas-instansi, yang selanjutnya dikendalikan melalui kementerian koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan. Koordinasi yang dilakukan oleh kementerian koordinasi ini melibatkan perumusan kebijakan yang mencakup aspek penemuan, penampungan, penanganan, dan pengawasan keimigrasian, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Presiden 125/2016. Lebih lanjut, melalui penerapan Peraturan Presiden ini, Indonesia kembali mengonfirmasi bahwa prinsip non-refoulement harus diutamakan dalam konteks penanganan pengungsi.

Indonesia memfokuskan kebijakan luar negerinya pada masalah kemanusiaan, terutama yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya, melalui pendekatan Keamanan Manusia. Mereka dianggap sangat penting untuk diterima sebagai pengungsi karena mereka menghadapi banyak ancaman keamanan, terutama karena ancaman politik yang berasal dari pelanggaran hak asasi manusia dan tekanan politik di negara asal mereka. Konsep ini sesuai dengan definisi Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, yang menggambarkan pengungsi sebagai orang yang tinggal di wilayah Indonesia karena takut akan persekusi berdasarkan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial, dan pendapat politik.

Ancaman terhadap keamanan politik bagi pengungsi Rohingya juga membawa risiko serius terkait dengan aspek ekonomi, kesehatan, pangan, individu, dan komunitas. Etnis Rohingya, selain hidup dalam kondisi yang tidak layak, juga menghadapi tantangan kesehatan yang signifikan akibat berada di laut selama berbulan-bulan. Keadaan ini menjadi fokus utama bagi Indonesia. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, menekankan bahwa sepanjang tahun 2020, Indonesia telah memberikan tempat sementara kepada dua kelompok pengungsi Rohingya, dengan total 396 orang, sebagai tindakan yang dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan. Upaya ini mencerminkan kepedulian Indonesia terhadap dampak multidimensional yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya, melibatkan berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, dan kehidupan individu.

Fokus utama dalam konteks ini adalah penekanan pada prinsip "atas dasar kemanusiaan" yang menjadi landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia terkait penerimaan pengungsi Rohingya. Pendekatan keamanan manusia menjadi panduan bagi kebijakan ini, dan terdapat penguatan melalui berbagai faktor determinan baik eksternal maupun internal yang terkait dengan isu etnis Rohingya. Dari segi eksternal, tekanan internasional muncul karena peran dominan Indonesia di ASEAN dan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selama periode 2019-2020. Sebagai negara yang aktif di forum internasional, Indonesia merangkul tanggung jawabnya untuk menanggapi krisis kemanusiaan, dengan kebijakan luar negeri yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan penyelesaian konflik berbasis perdamaian. Kombinasi dari pendekatan keamanan manusia dan intervensi diplomatik menandai komitmen Indonesia untuk menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan isu etnis Rohingya dalam kerangka yang lebih luas dari stabilitas regional dan global.

Sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri, Indonesia memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya, dipengaruhi oleh dorongan internasional yang mengakui peran utama Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Langkah ini mencerminkan keterlibatan aktif Indonesia dalam memberikan kontribusi pada penyelesaian konflik Rohingya, sesuai dengan harapan komunitas internasional terhadap negara ini sebagai agen perdamaian dan pemimpin di tingkat regional. Keputusan ini menunjukkan kesediaan Indonesia untuk mengambil inisiatif proaktif dalam menghadapi tantangan kemanusiaan, sekaligus memperkuat peran strategisnya dalam menangani isu-isu kompleks di tingkat regional dan internasional. Selain itu, Indonesia mengadopsi pendekatan Keamanan Manusia (Human Security) dalam kerangka kebijakan luar negerinya, dengan fokus utama pada dimensi kemanusiaan. Keputusan ini dipicu oleh berbagai ancaman keamanan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya, terutama dalam konteks ancaman keamanan politik.

Aspek internal juga memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan ini. Kesamaan agama, dukungan tinggi dari masyarakat, dan orientasi politik yang bersifat inward-looking dan people-oriented menjadi faktor-faktor internal yang mendorong Indonesia untuk mengambil kebijakan yang terbuka terhadap pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya merespons tekanan internasional, tetapi juga mencerminkan dinamika internal yang mempengaruhi keputusan Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya.

Penting untuk dicatat bahwa penerimaan terhadap pengungsi Rohingya bukan sekadar tindakan sementara, melainkan mencakup komitmen untuk menyelesaikan akar permasalahan. Indonesia diharapkan akan terus melibatkan langkah-langkah diplomasi dengan Myanmar untuk mengakhiri konflik ini secara menyeluruh. Dengan demikian, aspek kebijakan luar negeri terkait penerimaan pengungsi Rohingya melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan Indonesia, sambil tetap berkomitmen untuk menangani permasalahan hingga akarnya.

Dilema dan Tantangan Moral terhadap Pengambilan Keputusan

Dilema keputusan yang harus dibuat oleh pemerintah Indonesia menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Di satu sisi, warga Aceh semakin enggan untuk menampung etnis Rohingya dengan alasan etnis Rohingya “memberi kesan kurang baik bagi masyarakat”. Tetapi disisi lain ratifikasi perjanjian dan peraturan tentang HAM dan kemanusiaan yang telah disahkan dan disumpah oleh Indonesia harus dipatuhi oleh negara sendiri sehingga penanggulangan kasus seperti migrasi etnis Rohingya yang masuk ke dalam peraturan dan perjanjian yang disahkan harus juga didasarkan oleh pertimbangan peratifikasian yang sudah dilakukan. Menurut peratifikasian peraturan mengenai HAM dan Kemanusiaan di Indonesia seperti Peraturan Presiden 125/2016 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Indonesia harus mencari cara untuk menampung pengungsi Rohingya di Indonesia dan memberikan hak mendasar seperti tempat tinggal, pangan dan lain sebagainya.

Meninjau nilai - nilai etika pembuatan keputusan, Pemerintah Indonesia dapat melakukan penanggulangan sementara dengan mencoba menampung dan mengontrol pengungsian Rohingya secara sementara dengan mencoba melakukan penanggulangan jangka panjang dengan melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar dalam rangka membawa isu pengungsian etnis Rohingya dan berusaha untuk memberikan etnis Rohingya wilayah kembali di negara Myanmar.

Dampak Sosial, Politik, dan Kemanusiaan

Kebijakan penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia memberikan dampak yang substansial di berbagai aspek, seperti sosial, politik, dan kemanusiaan, dan menghasilkan perubahan mendalam dalam konteks regional dan global. Dari segi sosial, kebijakan ini mencerminkan solidaritas dan kepedulian Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh etnis Rohingya. Dengan memberikan perlindungan dan tempat berlindung kepada pengungsi Rohingya, Indonesia tidak hanya melaksanakan tanggung jawab kemanusiaan, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keberagaman, yang dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia.

1. Dampak Politik

Dari perspektif politik, keputusan Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya ini dapat memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin ASEAN dan perwakilan tidak tetap DKPP dalam menyelesaikan konflik Rohingya. Langkah ini juga dapat memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain, terutama Myanmar, dan mencerminkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah Rohingya. Dengan melakukan diplomasi yang aktif, Indonesia dapat menjadi mediator yang efektif dalam mendukung perdamaian di tingkat regional.

Jika kita lihat dari perspektif ASEAN, sebenarnya mereka belum secara efektif memenuhi perannya sebagai penengah dalam mengatasi masalah-masalah politik regional di Asia Tenggara, terutama Myanmar. Dalam hal ini di sisi politik, Indonesia dinilai menerapkan standar ganda terhadap pengungsi Rohingya. Hal ini bisa dibuktikan dari upaya Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi rohingya dan mengusahakan diplomasi politik lewat ASEAN. Namun, hal ini berkontradiksi dengan fakta bahwa Indonesia menyuplai senjata kepada pihak militer.

Realitanya, negara-negara yang menjadi anggota ASEAN belum sepenuhnya mengambil tindakan terhadap permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, di satu sisi ada negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Myanmar, namun di sisi lain ada beberapa negara yang tidak ingin membuka komunikasi dengan Myanmar. Dengan itu, hal inilah yang membuat Indonesia, sebagai ketua ASEAN, mengalami dilema dalam melakukan pendekatan diplomasi kepada Myanmar.

2. Dampak Sosial

Tibanya pengungsi Rohingya di Indonesia dan bagaimana masyarakat Indonesia menanggapi situasi tersebut mencerminkan rasa kemanusiaan yang tinggi. Proses adaptasi dan integrasi yang dijalankan oleh pengungsi di tanah air merupakan kondisi sosial yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia dengan mengedepankan toleransi yang tinggi. Meskipun penuh dengan tantangan seperti bahasa, budaya, dan norma sosial, kenyamanan pengungsi menjadi fokus utama.

Penggunaan sumber daya lokal oleh pengungsi, seperti udara, makanan, dan tempat tinggal, menjadi perhatian serius dalam mengelola dampaknya terhadap masyarakat lokal. Tentunya hal ini juga menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan pengelolaan pengungsi dan masyarakat lokal.

Pendidikan anak-anak pengungsi juga menjadi perhatian, membutuhkan upaya ekstra dan sumber daya yang memadai untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, sehingga bisa dinilai bahwa kedatangan pengungsi akan memperkaya keragaman sosial budaya di Aceh, namun tetap membutuhkan tingkat toleransi tinggi untuk memastikan integrasi yang harmonis.

3. Dampak Kemanusiaan

Dalam konteks kemanusiaan, kebijakan ini memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi yang menghadapi ancaman dari berbagai segi, termasuk ancaman keamanan politik, ekonomi, kesehatan, dan keamanan individu. Dengan menerima pengungsi Rohingya, Indonesia juga menegaskan kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan sesuai dengan definisi pengungsi luar negeri yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016.

Dengan demikian, dampak yang luas dari kebijakan penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia tidak hanya terbatas pada perlindungan langsung terhadap para pengungsi, tetapi juga mencakup peran yang semakin berkembang bagi Indonesia dalam skala regional dan global. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Isu pengungsian etnis Rohingya di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Dari tahun 2009, pengungsi Rohingya pertama kali mencoba mengungsi ke Indonesia secara rombongan dan semakin lama pandangan penerimaan pengungsi Rohingya oleh warga Aceh sebagai tempat pelabuhan paling umum untuk etnis Rohingya semakin lama semakin enggan. Situasi ini menciptakan dilema dimana satu sisi pemerintah harus mempertimbangkan suara rakyatnya sendiri dan di sisi lain harus mempertimbangkan peraturan HAM dan kemanusiaan yang sudah diratifikasi. Pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus sesuai dengan etika pengambilan keputusan dan perjanjian yang telah diratifikasi seperti Peraturan Presiden 125/2016 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu menerima pengungsian etnis Rohingya dan memberikan hak-hak dasar seperti sandang, pangan, papan.

B. Saran

Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia harus menjadi langkah jangka panjang yang memperhatikan masa depan pengungsi Rohingya dan juga warga Aceh. Penanggulangan sementara yang dapat dilakukan adalah memberikan penampungan sementara untuk pengungsi Rohingya yang telah tiba. Penampungan jangka panjang yang harus dilaksanakan secara matang adalah melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk memberikan tempat yang aman bagi warga mereka ber-etnis Rohingya sehingga Indonesia dan negara sekitar tidak lagi dilanda oleh pengungsian dan isu dari kedua sisi dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Listiarani, T. (2021). Analisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya di Indonesia. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 5(1), 19-32.

Moy, L. Y., & Kusuma, A. J. (2016). Latar belakang Indonesia menerima pengungsi Rohingya pada tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). *Global Insight Journal*, 1(1).

Rara Mulia, R. (2023). *RESPON MASYARAKAT ACEH TERHADAP KEDATANGAN PENGUNGSU ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).

Kidder, Rushworth M. (2009) *How Good People Make Tough Choices: Resolving the Dilemmas of Ethical Living*.

Hamzah, Intan Suria. (2016) *Pelarian Rohingya dan isu-isu kontemporer di Malaysia*. *Geografia Malaysian Journal of Society and Space*.